

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Upah adalah unsur utama pada penghasilan perkapita serta penambahan perekonomian di suatu wilayah yang secara langsung memiliki peran dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Pada penentuan upah minimum, pemerintah meninjau kapabilitas pertumbuhan serta berkembangnya instansi, keadaan pasar pekerja, indeks pembelian konsumen, pertumbuhan ekonomi serta inflasi daerah tersebut (Utami, 2019). Melalui peninjauan hal tersebut maka pemerintah akan melakukan pengkajian serta penetapan besaran upah minimum di seluruh wilayah, hal tersebut diberlakukan pula saat pemerintah berkeinginan untuk menambah upah minimal di sebuah wilayah. Sebab jika pemerintah tidak mengamati pertimbangan-pertimbangan tersebut maka berpotensi membuat roda ekonomi di wilayah terkait bisa terganggu serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam ekonomi, hal tersebut disebabkan karena peningkatan upah minimum yang tidak sesuai dapat memberikan pengaruh untuk tingkat konsumsi, distribusi, serta konsumsi (Utami, 2019).

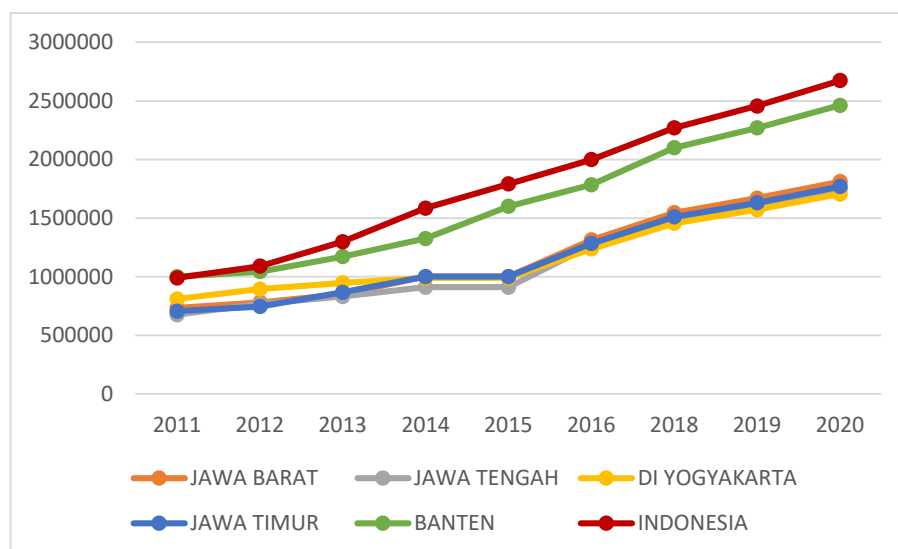
Pertambahan upah minimum yang tidak seimbang dengan kapabilitas kerja berpotensi menyebabkan kebangkrutan instansi sebab tidak sanggup memberikan upah pekerjanya dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal sehingga mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban kerja antara pengusaha dan karyawannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Karl Marx (1975) yang berpendapat bahwa adanya pertentangan kepentingan dalam membuat barang-barang modal yang bertujuan dalam menekan pemakaian pekerja sehingga berdampak pada peningkatan tawaran tenaga kerja di lapangan kerja, yang menyebabkan penurunan upah (Sumarsono, 2003).

Melalui keberadaan pertumbuhan pekerja maka akan memberikan dampak juga terhadap kenaikan permintaan barang di wilayah jadi meningkat yang berimbas pada harga yang berlaku di wilayah tersebut, namun dengan keberadaan pertumbuhan di harga barang terkait apabila tidak diiringi dengan pertumbuhan penghasilan, berpotensi dalam mempengaruhi ekonomi wilayah tersebut menjadi lemah dan menekan angka kesejahteraan sehingga tidak berlangsung optimal. Pada

aspek peningkatan kemakmuran penduduk, pemberlakuan upah minimum memiliki tujuan guna dapat menjadi pemenuh keperluan hidup keluarga. Tetapi pada kenyataannya, upah yang didapatkan oleh pekerja atau pegawai belum bisa mencukupi keperluan hidup diri dan keluarga dikarenakan peningkatan keperluan hidup secara terus menerus namun tidak diiringi dengan penambahan upah demi memenuhi keperluan hidup mereka (Gani, 2018).

Pulau Jawa adalah pusat industri serta pusat perekonomian di Indonesia melalui pertumbuhan perekonomian yang tinggi mempunyai biaya atau keperluan hidup yang lebih besar daripada provinsi lainnya di luar Pulau Jawa dan membuat upah minimal yang ditentukan harusnya melebihi provisi lainnya agar pekerja bisa mencukupi keperluan hidup dirinya beserta keluarganya sehari-hari, tetapi nyatanya UMP di Pulau Jawa tergolong sebagai provinsi dengan UMP paling rendah di Indonesia dimana ketimpangan diantara upah minimum nasional serta UMP di Pulau Jawa cukup signifikan. Dibandingkan daerah lainnya di luar Pulau Jawa yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari Pulau Jawa justru upah minimum yang ditetapkan lebih tinggi. Fenomena inilah yang mendasari peneliti memilih provinsi di Pulau Jawa dengan mengecualikan provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian. Berikut data Upah Minimum Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa.

Grafik 1 Upah Minimum Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses melalui Lab Digital IE Tahun 2022

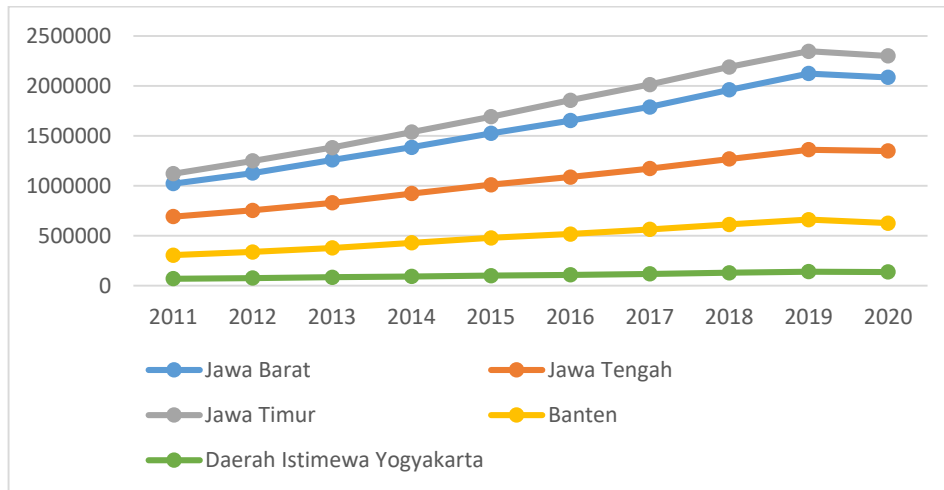
Berdasarkan grafik 1 tersebut terlihat bahwa upah minimum provinsi (UMP) selalu bertambah dari tahun 2011 hingga 2020. Provinsi yang memiliki UMP terendah dari tahun 2011 sampai 2022 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan upah minimum provinsi sebesar Rp. 1.704.608, selanjutnya paling rendah ke-2 yakni Jawa Tengah sebanyak Rp. 1.742.015. Kenaikan setiap tahun di tiap-tiap provinsi memiliki selisih yang terbilang kecil dibandingkan tahun-tahun terdahulu. Sedangkan upah yang ditetapkan akan berbeda antara sebuah wilayah dengan wilayah yang lain menurut keperluan hidup setiap orang yang bergantung pada domisili yang ia tinggali. Meski begitu, UMP di setiap provinsi tidak bisa disamaratakan dengan wilayah yang lain karena potensi pembelian penduduk serta keperluan hidupnya amat beragam sehingga terjadi kesenjangan besaran upah minimum diantara provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa dengan provinsi lainnya diluar Pulau Jawa.

Upah tenaga kerja dalam jangka panjang dapat mempunyai kapabilitas yang makin rendah pada pembelian produk maupun layanan yang diperlukan. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga serta nilai produk maupun layanan terkait. Pertambahan tersebut berpotensi melemahkan daya beli masyarakat. Pada hakikatnya, nilai produk serta upah akan senantiasa bertambah namun yang jadi persoalan adalah kenaikan yang tidak sama besar dan di waktu yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan. Ketimpangan tersebut akan menghasilkan kesukaran guna mengidentifikasi tahapan upah apakah mampu menaikkan kemakmuran tenaga kerja, yang membuat pada aspek tersebut upah harus disetarakan dengan naiknya harga produk agar daya beli tenaga kerja ikut bertambah.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu contoh indikator utama pada penilaian performa kerja sebuah ekonomi, khususnya dalam melaksanakan analisa mengenai hasil pertumbuhan perekonomian yang sudah dilangsungkan sebuah wilayah atau negara. Perekonomian tergolong bertumbuh jika produk maupun layanan yang dihasilkan bertambah dari tahun ke tahun. Perkembangan perekonomian memperlihatkan tahapan kegiatan ekonomi mampu memberikan tambahan penghasilan dan menaikkan kemakmuran penduduk di suatu kurun waktu tertentu (Suhada, et al., 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan

pertumbuhan ekonomi terlihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 (Milyar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses melalui Lab Digital IE Tahun 2022

Terlihat bahwa pada grafik 2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi pada seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2011-2020 secara jangka panjang menunjukkan tren yang meningkat. Perkembangan ekonomi memperlihatkan keberadaan kenaikan produk serta layanan yang dihasilkan di sebuah skema ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan perekonomian menjadi contoh parameter utama dalam menganalisa pembangunan (Pratama, Muljaningsih, & Asmara, 2021). Selain itu, menurut Karl Marx pertumbuhan ekonomi juga dimanfaatkan pada penentuan besaran upah sebab besar output yang diberikan akan berdampak atas keuntungan yang diperoleh sehingga apabila keuntungan bertambah maka besaran upah juga akan bertambah (Sely, 2019). Fenomena itu didasari oleh pernyataan Karl Marx yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didasari oleh produktivitas masyarakatnya sehingga berpengaruh terhadap peningkatan upah yang di terima oleh buruh atau pekerja, maka dari itu dapat dikatakan bahwa tingginya angka kenaikan pada perekonomian maka upah yang ditetapkan juga akan makin tinggi (Marx, 1975).

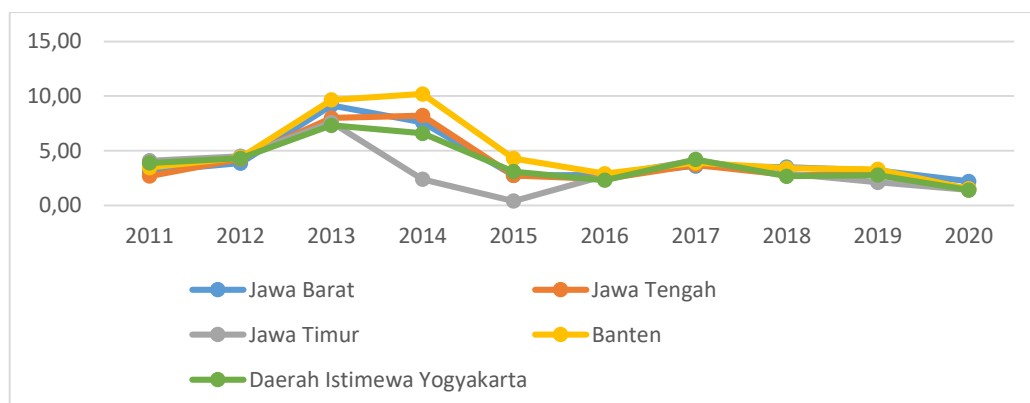
Terlihat pada grafik 2 tersebut, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh provinsi Jawa Timur, namun UMP Jawa Timur berada di urutan keempat dalam

periode 2011-2015 dan berada di urutan ketiga pada 5 tahun terakhir, provinsi Jawa Barat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua namun UMP Jawa Barat di tahun 2011-2015 ada di urutan ketiga serta selama 5 tahun terakhir berada di urutan kedua, provinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi ketiga namun UMP Jawa Tengah berada di posisi terendah dalam periode 2011-2015 namun pada 5 tahun terakhir berada di urutan keempat, provinsi Banten menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi keempat namun UMP yang ditetapkan berada pada UMP tertinggi dalam grafik 1, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki pertumbuhan ekonomi terendah namun UMP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2011-2015 berada di urutan kedua namun dalam 5 tahun terakhir berada di urutan terendah.

Fenomena tersebut menandakan bahwasanya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai sumbangsih perekonomian paling rendah di Pulau Jawa selama 5 tahun terakhir yang disebabkan oleh masih menunjukkan mutu perkembangan perekonomian kedaerahan yang rendah yang membuat daerah ini tidak sanggup menghasilkan sumbangsih yang berarti untuk tingkat ekonomi di Pulau Jawa (Ratnasari, 2016). Nyatanya, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk provinsi di kepulauan Jawa yang mempunyai potensi ekonomi yang melimpah ruah serta dapat mengakomodasi keberlangsungan performa kerja finansial daerah. Termasuk diantaranya unsur pariwisata dimana apabila unsur tersebut senantiasa berkembang serta memperoleh dukungan dari Pemda maka bisa mendukung kesuksesan sebuah daerah untuk dapat berkembang secara maksimal.

Perkembangan pada perekonomian mempengaruhi kenaikan upah minimum provinsi yang merupakan faktor tak langsung penyebab naiknya harga barang di pasar sehingga diibaratkan bahwasanya jika individu mendapatkan upah yang lebih tinggi maka individu tersebut akan memanfaatkan upahnya guna melakukan pembelian keperluan dengan berlebihan sehingga saat upah minimum bertambah akan berdampak pada terjadi peningkatan pada inflasi (Charysa, 2016). Pergerakan inflasi di Pulau Jawa tahun 2011-2020 amat berfluktuatif dimana keadaan itu bisa ditinjau melalui grafik dibawah ini.

Grafik 3 Inflasi Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses melalui Lab Digital IE Tahun 2022

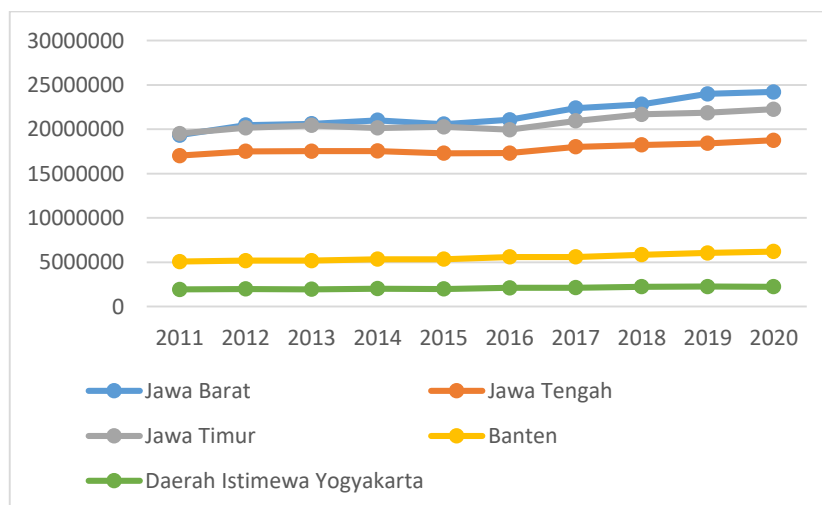
Terlihat dalam grafik 3 di atas bahwa terjadi peningkatan angka inflasi pada tahun 2013 yang jauh melebihi target Bank Indonesia di mana target tersebut berada di angka 4,5% sedangkan inflasi yang terjadi pada seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa jauh di atas target pemerintah. Hal tersebut ditimbulkan dari peningkatan harga BBM bersubsidi menjadi sebesar Rp.6.500 per liter serta solar menjadi sebesar Rp. 5.500 per liter dimana BBM tersebut memberikan sumbangsih terhadap inflasi sebanyak 1,17% (Ningsih & Andiny, 2018). Sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan inflasi pada Provinsi Banten dengan inflasi sebesar 10,2% dan Provinsi Jawa Tengah dengan inflasi sebesar 8,22% sehingga inflasi tersebut melesat jauh melebihi target inflasi yang sudah ditentukan oleh BI yaitu sebesar 4,5%, namun dengan adanya peningkatan angka inflasi tersebut penentuan upah yang ditetapkan oleh pemerintah hanya meningkat sebesar 11,7% atau Rp. 155.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan angka inflasi tersebut disebabkan oleh adanya Peraturan pemerintahan mengenai penentuan harga termasuk peningkatan bertahap tarif tenaga listrik (TTL), peningkatan harga BBM subsidi serta bahan bakar rumah tangga LPG 12 kg (Ningsih & Andiny, 2018).

Di sisi lain Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan angka inflasi pada tahun 2014 menjadi sebesar 7,6%, di mana lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,15% namun angka upah minimum di tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 15% atau Rp. 150.000, hal tersebut disebabkan oleh adanya pengendalian inflasi dengan mengeluarkan kebijakan dalam menguatkan

usaha untuk menstabilkan ekonomi melalui ditingkatkannya stok serta produksi, aksesibilitas teknologi, kelancaran distribusi berikut optimalisasi kerja sama dagang diantara wilayah (dpr.go.id, 2015). Sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan angka inflasi yang jauh di bawah target inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana angka inflasi Provinsi Jawa Timur di tahun 2013 sebesar 7,59 sedangkan pada tahun 2014 angka inflasi berada pada 2,38%, hal tersebut disebabkan oleh adanya komoditas dengan harga terkontrol serta menghasilkan sumbangsih paling besar atas deflasi yakni penurunan harga di masyarakat diantaranya modem internet, tauge, minyak goreng, nangka muda, semangka, jeruk, telepon seluler, jagung manis, pindang, ikan tongkol, serta salak (kominfo.jatimprov.go.id, 2015).

Aspek lainnya yang bisa memberikan pengaruh atas Upah Minimum Provinsi yakni angkatan kerja. Angkatan kerja dapat dimanfaatkan guna mengidentifikasi jumlah penawaran pekerja yang ada di pasar, sehingga melalui identifikasi tingkatan penawaran pekerja tersebut, maka bisa diselaraskan dengan upah yang pantas untuk tenaga kerja sebab upah disesuaikan dengan penawaran pekerja. Apabila penawaran pekerja bertambah, kelebihanannya akan dialokasikan ke sektor non resmi yang tingkatan upah tidak dikelola berdasarkan ketentuan pemerintah dan berpotensi menurunkan nilai upah (Sutama, Asmini, & Astika, 2019). Adapun data angkatan kerja setiap tahun terlihat dalam grafik berikut.

Grafik 4 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses melalui Lab Digital IE Tahun 2022

Terlihat dalam grafik 4 di atas bahwa jumlah angkatan kerja menunjukkan tren yang meningkat. Hal itu ditimbulkan dari adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Angkatan kerja yang meningkat menurut Karl Marx dapat menurunkan tingkat upah yang berlaku karena semakin banyak jumlah penawaran tenaga kerja yang berada di pasar tenaga kerja. Hal itu terjadi sebab penentuan UMP menyebabkan pekerja yang menganggur bertambah serta meningkatkan probabilitas tindakan curang pada rekrutmen yang berikutnya mempengaruhi nilai upah pada sebuah sektor yang tidak termasuk pada kebijakan UMP (Sholeh, 2017). Terlihat pada Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan total angkatan kerja terbanyak yang terdapat kenaikan angkatan kerja di setiap tahunnya namun tingkat upah yang ditetapkan berada di peringkat 3 terendah di Pulau Jawa. Hal itu disebabkan oleh keberadaan arus migrasi yang cukup tinggi ke Jawa Barat (Wahyuni, 2015).

Penelitian mengenai upah minimum provinsi telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian Nyoman Sutama, Asmini dan Suci Astika (2019) mengungkapkan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penentuan upah minimum. Adapun penelitian yang dinyatakan oleh Eni Larasati, Aji Sofyan Effendi dan Juliansyah Roy (2018) bahwa PDRB dan Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penentuan upah minimum. Penelitian oleh Robert Tua Siregar, Hery Pandapotan Silitonga, Khairunnisah Lubis dan Acai Sudirman (2020) menyatakan bahwa *Gross Regional Domestic Product* berpengaruh signifikan positif terhadap penentuan upah minimum. Penelitian Pramote Boontunjeen, Pimpimon Kaewmanee, Kittawit Autcharyapanitkul dan Kantaporn Chuangchid (2019) menyatakan bahwa *inflation* dan *economic growth* berpengaruh signifikan negatif terhadap penentuan upah minimum.

Merujuk pada uraian di atas, terdapat permasalahan yaitu adanya ketidaksamaan antara teori dan data serta adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya. Penghitungan dalam penetapan upah di suatu Provinsi dapat ditentukan oleh berbagai aspek, tetapi di studi ini hanya dibatasi oleh aspek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Angkatan Kerja sebab penelitian ini hanya menggunakan aspek makro melalui peninjauan kondisi perekonomian serta pekerja di Pulau Jawa. Oleh karena itu, menurut latar belakang tersebut yang telah

melatarbelakangi penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penentuan Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa”**

I.2 Perumusan Masalah

Pulau Jawa adalah pusat ekonomi di Indonesia, namun walaupun menjadi pusat perekonomian dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDRB di Indonesia, tingkat upah minimum yang ditentukan oleh pemerintahan masih berada di bawah angka upah minimum nasional, bahkan tingkat UMP provinsi yang terdapat di Pulau Jawa lebih kecil daripada provinsi lainnya yang terdapat di luar Pulau Jawa, sehingga dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan poin yang bisa ditarik penulis selaku perumusan permasalahan menurut latar belakang permasalahan yakni dijabarkan menjadi:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penentuan upah minimum provinsi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penentuan upah minimum provinsi di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap penentuan upah minimum di Pulau Jawa?

I.3 Tujuan Penelitian

Penentuan upah memiliki peran penting dalam tercapainya kesejahteraan serta daya beli masyarakat di Provinsi tersebut. Perubahan penentuan upah mendapat pengaruh dari berbagai konstruk seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Angkatan Kerja. Maka dari itu studi ini memiliki tujuan guna mengidentifikasi tingkatan pengaruhnya variabel terkait atas UMP di Pulau Jawa. Menurut perumusan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka studi ini bertujuan:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian teori atau studi literasi tentang analisa aspek-aspek yang memengaruhi penentuan UMP serta menghasilkan peluang guna melakukan studi lanjutan terkait penggajian

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pertimbangan untuk membuat peraturan perencanaan kesejahteraan pekerja khususnya terkait dalam UMP di Pulau Jawa.